



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.281, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Penguatan  
Infrastruktur. Prasarana Daerah. Pedoman.

## **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.07/2010**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR**

### **DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.7/2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

- (1) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
- (2) Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah).
- (3) DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

## Pasal 2

- (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPIPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPIPD untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

## Pasal 3

- (1) Daerah wajib menggunakan DPIPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang.

## Pasal 4

DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

## Pasal 5

Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dipergunakan untuk:

- a. mendukung pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan provinsi;
- b. menunjang peningkatan pelayanan jaringan irigasi provinsi;
- c. infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit provinsi, meliputi:
  1. penambahan tempat tidur kelas III;
  2. pelayanan unggulan; dan
  3. peralatan medis.
- d. prasarana pemerintahan daerah; dan
- e. penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

### Pasal 6

Alokasi DPIPD Tahun 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk:

- a. pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan/ jembatan;
- b. pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
- c. penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase;
- d. infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit kabupaten/kota, meliputi:
  1. penambahan tempat tidur kelas III;
  2. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
  3. Unit Transfusi Darah (UTD);
  4. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  5. Peralatan medis.
- e. menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah;
- f. penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan
- g. penyediaan prasarana pemerintahan daerah.

### Pasal 7

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPIPD meliputi:

- a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus;
- b. sewa (contoh : gedung kantor, kendaraan operasional);
- c. administrasi kegiatan (contoh : gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
- d. penelitian;
- e. pelatihan; dan
- f. perjalanan dinas pegawai daerah.

### Pasal 8

- (1) Penyaluran DPIPD Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
  - c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
  - (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2010.
  - (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPIPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 9

- (1) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPIPD harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPIPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010.

Pasal 11

- (1) Daerah penerima DPIPD dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama.

Pasal 12

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPIPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2010  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI  
 KEMENTERIAN KEMAHAMATAN  
 NOMOR 112/PMK/2009 TENTANG  
 PEDOMAN TITIK DAN ALOKASI  
 DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
 INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN  
 ANGARAN 2010

**PENETAPAN ALOKASI  
 DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN  
 UNTUK KABUPATEN/KOTA TA. 2010**

Satuan: Rp. Milyar

NO	DAERAH	ALOKASI
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kab. Aceh Barat	3.868,000
2	Kab. Aceh Besar	1.000,000
3	Kab. Aceh Selatan	3.868,000
4	Kab. Aceh Singkil	1.000,000
5	Kab. Aceh Tengah	1.000,000
6	Kab. Aceh Tenggara	1.000,000
7	Kab. Aceh Timur	3.868,000
8	Kab. Aceh Utara	1.000,000
9	Kab. Bireuen	3.868,000
10	Kab. Pidie	3.868,000
11	Kab. Simeulue	1.000,000
12	Kota Banda Aceh	1.000,000
13	Kota Sabang	1.000,000
14	Kota Langsa	1.000,000
15	Kota Lhokseumawe	1.000,000
16	Kab. Nagan Raya	1.000,000
17	Kab. Aceh Jaya	1.000,000
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.868,000
19	Kab. Gayo Lues	1.000,000
20	Kab. Aceh Tamiang	3.868,000
21	Kab. Bener Meriah	1.000,000
22	Kab. Pidie Jaya	3.868,000
23	Kota Subulussalam	1.000,000
II	Provinsi Sumatera Utara	
24	Kab. Asahan	1.000,000
25	Kab. Deli	3.868,000
26	Kab. Deli Serdang	1.000,000
27	Kab. Tanah Karo	3.868,000
28	Kab. Labuhan Ratu	1.000,000
29	Kab. Langkat	3.868,000
30	Kab. Mandailing Natal	1.000,000
31	Kab. Nias	3.868,000
32	Kab. Simalungun	3.868,000
33	Kab. Tapanuli Selatan	1.000,000
34	Kab. Tapanuli Tengah	1.000,000
35	Kab. Tapanuli Utara	1.000,000
36	Kab. Toba Samosir	3.868,000
37	Kota Binjai	1.000,000
38	Kota Medan	1.000,000
39	Kota Pematang Siantar	3.868,000
40	Kota Sibolga	1.000,000
41	Kota Tanjung Balai	3.868,000

NO	DAERAH	ALOKASI
42	Kota Tebing Tinggi	1.000,000
43	Kota Padang Sidempuan	1.000,000
44	Kab. Pakpak Bharat	1.000,000
45	Kab. Nias Selatan	3.868,000
46	Kab. Humbang Hasandaulan	3.868,000
47	Kab. Serdang Bedagai	3.868,000
48	Kab. Sumbai	1.000,000
49	Kab. Batu Bara	3.868,000
50	Kab. Padang Lawas	3.868,000
51	Kab. Padang Lawas Utara	1.000,000
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.000,000
53	Kab. Labuhan Batu Utara	1.000,000
54	Kab. Nias Barat	1.000,000
55	Kab. Nias Utara	1.000,000
56	Kota Gunung Sitoli	3.868,000
III	Provinsi Sumatera Barat	
57	Kab. Lima puluh Kota	1.000,000
58	Kab. Agam	1.000,000
59	Kab. Kepulauan Mentawai	1.000,000
60	Kab. Padang Pariaman	1.000,000
61	Kab. Pasaman	1.000,000
62	Kab. Pasisir Selatan	3.868,000
63	Kab. Sijunjung	1.000,000
64	Kab. Solok	3.868,000
65	Kab. Tanah Datar	3.868,000
66	Kota Bukit Tinggi	3.868,000
67	Kota Padang Panjang	3.868,000
68	Kota Padang	3.868,000
69	Kota Payakumbuh	1.000,000
70	Kota Sawahlunto	1.000,000
71	Kota Solok	3.868,000
72	Kota Pariaman	3.868,000
73	Kab. Pasaman Barat	1.000,000
74	Kab. Dharmasraya	3.868,000
75	Kab. Solok Selatan	3.868,000
IV	Provinsi Riau	
76	Kab. Bengkalis	1.000,000
77	Kab. Indragiri Hilir	3.868,000
78	Kab. Indragiri Hulu	1.000,000
79	Kab. Kampar	3.868,000
80	Kab. Kuantan Singingi	1.000,000
81	Kab. Pelalawan	3.868,000
82	Kab. Rokan Hilir	3.868,000
83	Kab. Rokan Hulu	3.868,000
84	Kab. Siak	3.868,000
85	Kota Dumai	1.000,000
86	Kota Pekanbaru	1.000,000
87	Kab. Meranti	3.868,000
V	Provinsi Kepulauan Riau	
88	Kab. Bintan	1.000,000



NO	DAERAH	ALOKASI
88	Kab. Natuna	1.000,000
89	Kab. Karimun	1.000,000
91	Kota Batam	1.000,000
92	Kota Tanjung Pinang	1.010,000
93	Kab. Lingga	1.000,000
94	Kab. Anambas	1.000,000
VI	Provinsi Jambi	
95	Kab. Batanghari	1.000,000
96	Kab. Bungo	1.000,000
97	Kab. Ketohi	3.868,000
98	Kab. Merangin	1.000,000
99	Kab. Muaro Jambi	3.868,000
100	Kab. Sarolangun	3.868,000
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.000,000
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.000,000
103	Kab. Tebo	1.000,000
104	Kota Jambi	1.000,000
105	Kota Sungai Fering	3.868,000
VII	Provinsi Sumatera Selatan	
106	Kab. Lahat	1.000,000
107	Kab. Musi Banyuwasin	1.000,000
108	Kab. Musi Rawas	1.000,000
109	Kab. Muara Tami	1.000,000
110	Kab. Ogan Komering Ilir	1.000,000
111	Kab. Ogan Komering Ulu	3.868,000
112	Kota Palembang	1.000,000
113	Kota Pagar Alam	1.000,000
114	Kota Lubuk Linggau	3.868,000
115	Kota Prabumulih	1.000,000
116	Kab. Banyuwasin	1.000,000
117	Kab. Ogan Ilir	1.000,000
118	Kab. OKU Timur	3.868,000
119	Kab. OKU Selatan	1.000,000
120	Kab. Empat Lawang	1.000,000
VIII	Provinsi Bangka Belitung	
121	Kab. Bangka	3.868,000
122	Kab. Belitung	3.868,000
123	Kota Pangkal Pinang	3.868,000
124	Kab. Bangka Selatan	3.868,000
125	Kab. Bangka Tengah	3.868,000
126	Kab. Bangka Barat	3.868,000
127	Kab. Belitung Timur	1.000,000
IX	Provinsi Bengkulu	
128	Kab. Bengkulu Selatan	3.868,000
129	Kab. Bengkulu Utara	3.868,000
130	Kab. Rejang Lebong	3.868,000
131	Kota Bengkulu	3.868,000
132	Kab. Kaur	1.000,000
133	Kab. Seluma	3.868,000
134	Kab. Mukomuko	1.000,000

NO	DAERAH	ALOKASI
135	Kab. Lebong	1.000,000
136	Kab. Kepahiang	3.858,000
137	Kab. Bengkulu Tengah	3.858,000
X	Provinsi Lampung	
138	Kab. Lampung Barat	3.858,000
139	Kab. Lampung Selatan	1.000,000
140	Kab. Lampung Tengah	1.000,000
141	Kab. Lampung Utara	3.858,000
142	Kab. Lampung Timur	3.858,000
143	Kab. Tanggamus	3.858,000
144	Kab. Tulang Bawang	3.868,000
145	Kab. Way Kanan	1.000,000
146	Kota Bandar Lampung	3.868,000
147	Kota Metro	3.868,000
148	Kab. Pesiswaran	1.000,000
149	Kab. Mesuji	3.868,000
150	Kab. Pingsawu	1.000,000
151	Kab. Tulang Bawang Barat	3.868,000
XI	Provinsi DKI Jakarta	
XII	Provinsi Jawa Barat	
152	Kab. Bandung	1.000,000
153	Kab. Bekasi	2.500,000
154	Kab. Bogor	3.858,000
155	Kab. Ciamis	3.868,000
156	Kab. Cianjur	3.868,000
157	Kab. Cirebon	1.000,000
158	Kab. Garut	3.868,000
159	Kab. Indramayu	1.000,000
160	Kab. Karawang	3.868,000
161	Kab. Kuningan	3.868,000
162	Kab. Majalengka	1.000,000
163	Kab. Purwakarta	3.868,000
164	Kab. Subang	3.868,000
165	Kab. Sukabumi	1.000,000
166	Kab. Sumedang	1.000,000
167	Kab. Tasikmalaya	3.858,000
168	Kota Bandung	3.868,000
169	Kota Bekasi	3.868,000
170	Kota Bogor	3.868,000
171	Kota Cirebon	3.868,000
172	Kota Depok	1.000,000
173	Kota Sukabumi	1.000,000
174	Kota Cimahi	3.868,000
175	Kota Tasikmalaya	3.868,000
176	Kota Banjar	1.000,000
177	Kab. Bandung Barat	3.868,000
XIII	Provinsi Banten	
178	Kab. Lebak	3.868,000
179	Kab. Pandeglang	3.868,000
180	Kab. Serang	1.000,000

NO	DAERAH	ALOKASI
181	Kab. Tangerang	1.000,000
182	Kota Cilegon	1.000,000
183	Kota Tangerang	1.000,000
184	Kota Serang	3.868,000
185	Kota Tangerang Selatan	3.868,000
XIV	Provinsi Jawa Tengah	
186	Kab. Banjarnegara	3.868,000
187	Kab. Banyumas	3.868,000
188	Kab. Batang	1.000,000
189	Kab. Blora	1.000,000
190	Kab. Boyolali	1.000,000
191	Kab. Brebes	3.868,000
192	Kab. Cilacap	3.868,000
193	Kab. Demak	1.000,000
194	Kab. Grobogan	1.000,000
195	Kab. Jepara	3.868,000
196	Kab. Karanganyar	3.868,000
197	Kab. Kebumen	3.868,000
198	Kab. Kendal	3.868,000
199	Kab. Klondong	1.000,000
200	Kab. Kudus	3.868,000
201	Kab. Magelang	1.000,000
202	Kab. Pati	1.000,000
203	Kab. Pekalongan	1.000,000
204	Kab. Pemalang	1.000,000
205	Kab. Purbalingga	3.868,000
206	Kab. Purworejo	1.000,000
207	Kab. Rembang	1.000,000
208	Kab. Semarang	3.868,000
209	Kab. Sragen	3.868,000
210	Kab. Sukoharjo	1.000,000
211	Kab. Tegal	3.868,000
212	Kab. Temanggung	3.868,000
213	Kab. Wonorejo	3.868,000
214	Kab. Wonosobo	3.868,000
215	Kota Magelang	3.868,000
216	Kota Pekalongan	1.000,000
217	Kota Salatiga	3.868,000
218	Kota Semarang	3.868,000
219	Kota Sukoharjo	1.000,000
220	Kota Tegal	1.000,000
XV	Provinsi DI Yogyakarta	
221	Kab. Bantul	3.868,000
222	Kab. Gunung Kidul	1.000,000
223	Kab. Kulon Progo	1.000,000
224	Kab. Sleman	1.000,000
225	Kota Yogyakarta	1.000,000
XVI	Provinsi Jawa Timur	
226	Kab. Bangkalan	3.868,000
227	Kab. Banyuwangi	1.000,000

NO	DAERAH	ALOKASI
228	Kab. Blitar	3.868,000
229	Kab. Bojonegoro	3.868,000
230	Kab. Bondowoso	3.868,000
231	Kab. Gresik	1.000,000
232	Kab. Jember	1.000,000
233	Kab. Jombang	3.868,000
234	Kab. Kediri	3.868,000
235	Kab. Lamongan	1.000,000
236	Kab. Lumajang	2.000,000
237	Kab. Madiun	3.868,000
238	Kab. Magetan	3.868,000
239	Kab. Malang	3.868,000
240	Kab. Mojokerto	3.868,000
241	Kab. Nganjuk	1.000,000
242	Kab. Ngawi	3.868,000
243	Kab. Pacitan	1.000,000
244	Kab. Pamekasan	1.000,000
245	Kab. Pasmaman	1.000,000
246	Kab. Ponorogo	1.000,000
247	Kab. Probolinggo	3.868,000
248	Kab. Sampang	1.000,000
249	Kab. Sidoarjo	3.868,000
250	Kab. Situbondo	1.000,000
251	Kab. Sumenep	3.868,000
252	Kab. Trenggalek	3.868,000
253	Kab. Tulungagung	1.000,000
254	Kab. Tulungagung	3.868,000
255	Kab. Blitar	3.868,000
256	Kota Kediri	3.868,000
257	Kota Madiun	1.000,000
258	Kota Malang	3.868,000
259	Kota Mojokerto	3.868,000
260	Kota Pasmaman	3.868,000
261	Kota Probolinggo	3.868,000
262	Kota Surabaya	3.868,000
263	Kota Batu	3.868,000
<b>XVII Provinsi Kalimantan Barat</b>		
264	Kab. Bangkayang	3.868,000
265	Kab. Landak	3.868,000
266	Kab. Kapuas Hulu	3.868,000
267	Kab. Kotabang	3.868,000
268	Kab. Pontianak	1.000,000
269	Kab. Sambas	3.868,000
270	Kab. Sanggau	3.868,000
271	Kab. Sintang	1.000,000
272	Kota Pontianak	3.868,000
273	Kota Singkawang	3.868,000
274	Kab. Sukadana	3.868,000
275	Kab. Melawi	3.868,000
276	Kab. Kayong Utara	1.000,000

NO	DAERAH	ALOKASI
277	Kab. Kubu Raya	3.868,000
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	
278	Kab. Bako Selatan	1.000,000
279	Kab. Bako Utara	3.868,000
280	Kab. Kapuas	3.868,000
281	Kab. Kotawaringin Barat	1.000,000
282	Kab. Kotawaringin Timur	1.000,000
283	Kota Palangkaraya	3.868,000
284	Kab. Bako Timur	1.000,000
285	Kab. Murung Raya	1.000,000
286	Kab. Pulang Pisau	3.868,000
287	Kab. Gunung Mas	1.000,000
288	Kab. Lamandau	3.868,000
289	Kab. Sukamara	1.000,000
290	Kab. Katingan	1.000,000
291	Kab. Seruyan	1.000,000
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	
292	Kab. Banjar	3.868,000
293	Kab. Banjar Kuala	3.868,000
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.000,000
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.000,000
296	Kab. Hulu Sungai Utara	1.000,000
297	Kab. Kota Baru	3.868,000
298	Kab. Taharung	1.000,000
299	Kab. Tanah Laut	3.868,000
300	Kab. Tapin	3.868,000
301	Kota Banjar Baru	1.000,000
302	Kota Banjarmasin	3.868,000
303	Kab. Balangan	3.868,000
304	Kab. Tanah Bumbu	1.000,000
XX	Provinsi Kalimantan Timur	
305	Kab. Berau	3.868,000
306	Kab. Bulungan	1.000,000
307	Kab. Kutai Kalimantan	1.000,000
308	Kab. Kutai Barat	3.868,000
309	Kab. Kutai Timur	1.000,000
310	Kab. Mahakam	1.000,000
311	Kab. Nunukan	1.000,000
312	Kab. Paser	1.000,000
313	Kota Balikpapan	3.868,000
314	Kota Bontang	1.000,000
315	Kota Samarinda	3.868,000
316	Kota Tarakan	3.868,000
317	Kab. Penajam Paser Utara	3.868,000
318	Kab. Tana Tidung	3.868,000
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	
319	Kab. Bulang Mongondow	3.868,000
320	Kab. Minahasa	3.868,000
321	Kab. Sangihe	3.868,000
322	Kota Bulung	3.868,000

NO	DAERAH	ALOKASI
323	Kota Manado	1.000,000
324	Kab. Kepulauan Talaud	3.868,000
325	Kab. Minahasa Selatan	3.868,000
326	Kota Tomohon	1.000,000
327	Kab. Minahasa Utara	1.000,000
328	Kota Kotamobagu	3.868,000
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.000,000
330	Kab. Kota Siau Tagulandang Biara	3.868,000
331	Kab. Minahasa Tenggara	3.868,000
332	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.000,000
333	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.868,000
XXIII	Provinsi Gorontalo	
334	Kab. Gorontalo	1.000,000
335	Kab. Gorontalo	1.000,000
336	Kota Gorontalo	1.000,000
337	Kab. Pohuwato	1.000,000
338	Kab. Bone Bolango	1.000,000
339	Kab. Gorontalo Utara	1.000,000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	
340	Kab. Banggai	3.868,000
341	Kab. Banggai Kepulauan	1.000,000
342	Kab. Buol	1.000,000
343	Kab. Toli Toli	3.868,000
344	Kab. Donggala	3.868,000
345	Kab. Morowali	1.000,000
346	Kab. Poso	3.868,000
347	Kota Palu	3.868,000
348	Kab. Parigi Moutong	3.868,000
349	Kab. Tojo Una-Una	3.868,000
350	Kab. Sigi	3.868,000
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	
351	Kab. Bantaeng	3.868,000
352	Kab. Barru	3.868,000
353	Kab. Bantaeng	3.868,000
354	Kab. Bantaeng	1.000,000
355	Kab. Enrekang	3.868,000
356	Kab. Gowa	3.868,000
357	Kab. Jeneponto	3.868,000
358	Kab. Luwu	3.868,000
359	Kab. Luwu Utara	3.868,000
360	Kab. Maros	1.534,000
361	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.868,000
362	Kab. Pinrang	3.868,000
363	Kab. Selayar	3.868,000
364	Kab. Sidenreng Rappang	3.868,000
365	Kab. Sinjai	3.868,000
366	Kab. Soppeng	1.000,000
367	Kab. Takala	3.868,000
368	Kab. Tana Toraja	3.868,000
369	Kab. Wajo	3.868,000

NO	DAERAH	ALOKASI
370	Kota Parepare	3.868,000
371	Kota Makassar	3.868,000
372	Kota Palopo	3.868,000
373	Kab. Luwu Timur	3.868,000
374	Kab. Toraja Utara	3.868,000
<b>XXV Provinsi Sulawesi Barat</b>		
375	Kab. Majene	3.868,000
376	Kab. Mamuju	1.000,000
377	Kab. Polewali Mandar	3.868,000
378	Kab. Mamasa	1.000,000
379	Kab. Mamuju Utara	1.000,000
<b>XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara</b>		
380	Kab. Buton	3.868,000
381	Kab. Konawe	1.000,000
382	Kab. Kolaka	3.868,000
383	Kab. Muna	1.000,000
384	Kota Kendari	3.868,000
385	Kota Bau-bau	1.000,000
386	Kab. Konawe Selatan	3.868,000
387	Kab. Bombana	1.000,000
388	Kab. Wakatobi	3.868,000
389	Kab. Kolaka Utara	3.868,000
390	Kab. Konawe Utara	1.000,000
391	Kab. Buton Utara	3.868,000
<b>XXVII Provinsi Bali</b>		
392	Kab. Badung	1.000,000
393	Kab. Bangli	1.000,000
394	Kab. Buleleng	1.000,000
395	Kab. Gianyar	3.868,000
396	Kab. Jembrana	1.000,000
397	Kab. Karangasem	3.868,000
398	Kab. Klungkung	3.868,000
399	Kab. Tabanan	3.868,000
400	Kota Denpasar	1.000,000
<b>XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>		
401	Kab. Bima	2.000,000
402	Kab. Dompu	2.000,000
403	Kab. Lombok Barat	3.868,000
404	Kab. Lombok Tengah	1.000,000
405	Kab. Lombok Timur	1.000,000
406	Kab. Sumbawa	1.000,000
407	Kota Mataram	1.000,000
408	Kota Bima	2.000,000
409	Kab. Sumbawa Barat	1.000,000
410	Kab. Lombok Utara	1.000,000
<b>XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		
411	Kab. Alor	1.000,000
412	Kab. Belu	3.868,000
413	Kab. Ende	4.018,000
414	Kab. Flores Timur	3.868,000

NO	DAERAH	ALOKASI
416	Kab. Kupang	1.000,000
416	Kab. Lembata	3.958,000
417	Kab. Manggarai	3.958,000
418	Kab. Ngada	1.000,000
419	Kab. Sikka	3.858,000
420	Kab. Sumba Barat	1.000,000
421	Kab. Sumba Timur	1.000,000
422	Kab. Timor Tengah Selatan	1.000,000
423	Kab. Timor Tengah Utara	1.000,000
424	Kota Kupang	1.000,000
425	Kab. Boli-Boli	1.000,000
426	Kab. Manggarai Barat	1.000,000
427	Kab. Nggahan	1.000,000
428	Kab. Sumba Barat Daya	1.868,000
429	Kab. Sumba Tengah	1.000,000
430	Kab. Manggarai Timur	1.000,000
431	Kab. Sabu Raijua	1.000,000
XXX	Provinsi Maluku	
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.000,000
433	Kab. Maluku Tengah	1.000,000
434	Kab. Maluku Tenggara	3.868,000
435	Kab. Pulau Buru	3.868,000
436	Kota Ambon	1.000,000
437	Kab. Seram Bagian Barat	3.858,000
438	Kab. Seram Bagian Timur	3.858,000
439	Kab. Kepulauan Aru	1.000,000
440	Kota Tual	3.868,000
441	Kab. Maluku Barat Daya	1.000,000
442	Kab. Buru Selatan	3.868,000
XXXI	Provinsi Maluku Utara	
443	Kab. Halmahera Tengah	3.868,000
444	Kab. Halmahera Barat	1.000,000
445	Kota Ternate	1.000,000
446	Kab. Halmahera Timur	1.000,000
447	Kota Tidore Kepulauan	3.868,000
448	Kab. Kepulauan Sula	3.868,000
449	Kab. Halmahera Selatan	1.000,000
450	Kab. Halmahera Utara	1.000,000
451	Kab. Pulau Morotai	1.000,000
XXXXII	Provinsi Papua	
452	Kab. Biak Numfor	3.868,000
453	Kab. Jayapura	3.868,000
454	Kab. Jayawijaya	3.958,000
455	Kab. Mamberamo	3.868,000
456	Kab. Mimika	3.868,000
457	Kab. Nabire	1.868,000
458	Kab. Paniai	3.868,000
459	Kab. Puncak Jaya	3.868,000
460	Kab. Kepulauan Yapen	3.868,000
461	Kota Jayapura	3.868,000



NO	DAERAH	ALOKASI
402	Kab. Sarmi	3.868,000
403	Kab. Koro	1.000,000
404	Kab. Mahukimo	3.868,000
405	Kab. Pegunungan Bintang	1.000,000
408	Kab. Tolikara	3.868,000
409	Kab. Boven Digoel	3.868,000
455	Kab. Mado	3.868,000
460	Kab. Asmat	1.000,000
470	Kab. Waropen	4.068,000
471	Kab. Supiori	4.068,000
472	Kab. Mamberamo Raya	1.000,000
475	Kab. Mamberamo Tengah	3.868,000
474	Kab. Yalimo	3.868,000
476	Kab. Lanny Jaya	3.868,000
478	Kab. Milneba	3.868,000
477	Kab. Puncak	1.000,000
476	Kab. Papiyai	3.868,000
479	Kab. Intan Jaya	1.000,000
480	Kab. Deyar	1.000,000
XXXII	Provinsi Papua Barat	
481	Kab. Sorong	4.068,000
482	Kab. Manokwari	3.868,000
483	Kab. Fak Fak	4.068,000
484	Kota Sorong	3.868,000
485	Kab. Sorong Selatan	3.868,000
486	Kab. Raja Ampat	3.868,000
487	Kab. Teluk Bintuni	3.868,000
488	Kab. Teluk Wondama	1.000,000
489	Kab. Kaimana	3.868,000
490	Kab. Maybrat	1.000,000
491	Kab. Tambora	3.868,000
JUMLAH TOTAL		1.250.000,000

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

TERLAMPIR  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 11/L/PERK/07/2010 TENTANG  
 PENYALURAN, PENYALURAN, DAN ALOKASI  
 DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
 INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN  
 ANGGARAN 2010

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota\*) Kabupaten/Kota . . . . . (diisi nama daerah) . . . . . menyatakan telah mencantumkan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau akan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran tahap 1 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Bupati/Walikota

Pemerintah Kabupaten/Kota \*).....

(Cap dan tanda tangan)

(materai Rp.6.000,-)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

PELAYANAN, MENTERI KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

**Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan**  
Kabupaten/Kota: ..... (diisi nama daerah)

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pembuatan Surat Penyelesaian								
2	Pencapaian Tahap I								
3	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I								
4	Pelaporan Penyelesaian Tahap I								
5	Pencapaian Tahap II								
6	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II								
7	Pelaporan Penyelesaian Tahap II								
8	Pencapaian Tahap III								
9	Pelaksanaan Kegiatan Tahap III								
10	Pelaporan Final Kegiatan								

Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. Beri Tanda (X)

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Bupati/Walikota  
Pemerintah Kabupaten/Kota: .....

(Cap dan tanda tangan)  
(Materai Rp.6000,-)  
Nama: .....

MENTERI KEUANGAN

AGUS D. W. MARIOWARDOJO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 114 /PMK/07/2010 TENTANG  
PENGGUNAAN UMUM DAN ALOKASI DANA  
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN  
PROGRAMAS TAHUNAN TAHUN  
ANGGARAN 2010

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) TAHUN ANGGARAN 2010

Kabupaten/Kota: ..  
Perda APBD Nomor ..... Tanggal .....

Bidang <sup>a)</sup>	Pagu <sup>a)</sup>
1. ....	.....
2. ....	.....
3 dst. ....	.....
Total Pagu	.....

Tanggal <sup>b)</sup>	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Pendanaan dari Kas Umum Negara	Total	Ralisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) <sup>c)</sup>	Sisa DPPIP di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 2 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = (7/3) x 100%
	Tahap I						
	Tahap II						
	Tahap III						
Total							

Tesput, Tanggal, Bulan, Tahun  
Bupati/ Walikota<sup>d)</sup>

(cap dan tanda tangan)  
(materai 6000,-)

Nama .....

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak Perlu.
- 2) Diisi sesuai dengan Alokasi dalam Lampiran I
- 3) Diisi tanggal diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) Minimal 90% dari dana Alokasi DPPIP Tahun 2010 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO